

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tersusunnya Laporan Kinerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur tahun 2016 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Jawa Timur;
2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Timur terhadap penyelenggara Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

1. Kondisi Geografis

Keberadaan Provinsi Jawa Timur merupakan proses sejarah panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai perkembangan pada zamannya. Pembentukan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 111°0' hingga 114°4' Bujur Timur dan 7°12' hingga 8°48' Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 48.039,14 km² yang meliputi dua bagian utama yaitu Jawa Timur daratan dan kepulauan. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 90 persen atau 43.235 km², sementara wilayah kepulauan memiliki luas 10 persen atau sebesar 4.804,14 km². (Sumber : Database BPS Tahun 2014).

Secara administratif berdasarkan PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota), yang mempunyai 664 kecamatan dengan 8.505 desa/kelurahan (783 kelurahan dan 7.772 desa). Di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka, Samudera Indonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 kilometer. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200

kilometer, sedangkan di bagian timur lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan Pulau Sempu. (Sumber : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 2004).

Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga wilayah dataran, yakni dataran tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata di atas 100 meter dari permukaan laut (Magetan, Trenggalek, Blitar, Malang, Batu, Bondowoso). Dataran sedang mempunyai ketinggian 45-100 meter di atas permukaan laut (Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Madiun, Ngawi). Kabupaten/kota (20) sisanya berada di daerah dataran rendah, yakni dengan ketinggian di bawah 45 meter dari permukaan laut. (RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031).

Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan kota yang letaknya paling rendah, yaitu sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kota yang letaknya paling tinggi dari permukaan laut adalah Malang, dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Secara fisiografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam tiga zona: zona selatan-barat (plato), merupakan pegunungan yang memiliki potensi tambang cukup besar; zona tengah (gunung berapi), merupakan daerah relatif subur terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso); dan zona utara dan Madura (lipatan), merupakan daerah relatif kurang subur (pantai, dataran rendah dan pegunungan). Di bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) ini terdapat Pegunungan

Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus. (RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031).

Pada bagian tengah wilayah Jawa Timur terbentang rangkaian pegunungan berapi. Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung Lawu (3.265 meter). Di sebelah selatan Nganjuk terdapat Gunung Wilis (2.169 meter) dan Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno (3.239 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Wayang (2.198 meter), Gunung Kawi (2.681 meter), dan Gunung Kelud (1.731 meter). Pegunungan tersebut terletak di sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. (RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031).

Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.192 meter) dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang disebut Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di bagian timur terdapat dua kelompok pegunungan: Pegunungan Iyang dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter), dan Pegunungan Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.332 meter). Pada bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai selatan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di Yogyakarta. (RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031).

Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290 km), dan Bengawan Solo. Sungai Brantas memiliki mata air di daerah Malang. Sesampai di Mojokerto, Sungai Brantas pecah menjadi dua: Kali Mas dan Kali Porong. Keduanya bermuara di Selat Madura. Bengawan Solo berasal dari Jawa Tengah, akhirnya bermuara di Gresik. Di lereng Gunung Lawu di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Telaga

Sarangan, sebuah danau alami. Bendungan utama di Jawa Timur antara lain Bendungan Sutami dan Bendungan Selorejo, yang digunakan untuk irigasi, pemeliharaan ikan, dan pariwisata.(RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031).

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan wilayah Pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar 21-34°C. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah, bahkan di daerah Ranu Pane (lereng Gunung Semeru), suhu bisa mencapai minus 4°C, yang menyebabkan turunnya salju lembut.

Suhu tertinggi terjadi pada Oktober dan November (35,3°C), dan terendah di bulan Agustus (19,3°C) dengan kelembaban 39%-97%. Tekanan udara tertinggi di bulan Agustus sebesar 1.012,0 Milibar. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di bulan Februari. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan Agustus, sedangkan terendah di bulan April. Kecepatan angin tertinggi terjadi di bulan Oktober, dan terendah di bulan April. (Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Tahun 2013).

2. Kondisi Demografis

Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai 38.610.200 jiwa, dengan laju pertumbuhan 0,659%. Kepadatan penduduk di kota umumnya lebih tinggi dibanding di kabupaten. Kota Surabaya memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yakni 8.335 jiwa/km², sekaligus mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 2.720.156 jiwa, diikuti Kabupaten Malang (2.442.422 jiwa), dan Kabupaten Jember (2.293.740 jiwa). (Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2014).

Pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Timur di setiap kabupaten/ kota sangat bervariasi dari yang tertinggi Kota Surabaya dengan jumlah penduduk sekitar 2.801.409 jiwa dengan

laju pertumbuhan 0,56% dan terendah yaitu Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk sebesar 122.550 jiwa. (Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2014).

Penduduk Jawa Timur mayoritas (46,18%) memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, selebihnya bekerja di sektor perdagangan (18,80%), sektor jasa (12,78%), dan sektor industri (12,51%). (Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2014).

Etnisitas di Jawa Timur relatif heterogen, mayoritas penduduk adalah suku Jawa. Suku Madura mendiami Pulau Madura dan daerah bagian timur, terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Di sejumlah kawasan timur, suku Madura, termasuk Pendalungan (campuran Jawa dan Madura), merupakan mayoritas. Suku Madura tersebar hampir di seluruh kota di Jawa Timur, umumnya mereka bekerja di sektor informal. Suku Tengger, yang keturunan pelarian Kerajaan Majapahit, tersebar di Pegunungan Tengger dan sekitarnya. Suku Osing tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Suku Bali juga bermukim di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Suku Samin tinggal di sebagian pedalaman Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, penduduk keturunan Tionghoa dan Arab juga tersebar di hampir semua wilayah kabupaten/kota Jawa Timur. Juga warga ekspatriat, terutama tinggal di Kota Surabaya, dan sejumlah kawasan industri lainnya.

Penduduk Jawa Timur mayoritas beragama Islam (95,76%). Sedangkan penduduk yang beragama Kristen Protestan sebesar 1,98%; Katolik (0,98%); Hindu (0,94%); Budha (0,29%); dan lainnya (0,05%). (Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2013).

3. Kondisi Makro Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Jawa Timur sampai dengan akhir Tahun 2014 menunjukkan sedikit perlambatan, hal ini terkait dengan kondisi eksternal perekonomian dunia, nilai tukar

Rupiah, faktor perubahan iklim, bencana alam dan faktor lainnya. Secara umum perekonomian Jawa Timur dalam beberapa tahun sangat sehat. Struktur perekonomiannya cukup tangguh yang ditopang oleh kekuatan sektor industri, perdagangan dan pertanian.

Pada Tahun 2014 metode perhitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2000 dengan 9 (sembilan) sektor lapangan usaha, dimana pertumbuhannya mengalami perlambatan dari 6,55 persen pada Tahun 2013 menjadi 6,06 persen pada Tahun 2014. Sedangkan PDRB ADHB Tahun 2014 mencapai 1.291,99 triliun dan PDRB ADHK mencapai 444,85 triliun. (Sumber : *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur akhir Tahun Anggaran 2014*).

Selanjutnya jika menggunakan metode perhitungan tahun dasar 2010 dengan 19 (sembilan belas) sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga mengalami perlambatan dari 6,08 persen pada Tahun 2013 menjadi 5,86 persen pada Tahun 2014 dan PDRB ADHB nya mencapai 1.540,69 triliun serta PDRB ADHK mencapai 1.262,70 triliun. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86 persen di Tahun 2014 didukung oleh pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,88 persen, diikuti oleh jasa perusahaan sebesar 8,52 persen dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,17 persen. (Sumber : *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur akhir Tahun Anggaran 2014*).

b. Inflasi

Dalam kurun waktu 5 tahun, Tahun 2010 inflasi tahunan Jawa Timur sama dengan inflasi tahunan nasional sebesar 6,96 persen, tahun 2011 - 2012 inflasi Jawa Timur sedikit diatas inflasi nasional yaitu masing-masing 4,09 persen

(2011) dan 4,50 persen (2012), tetapi pada tahun 2013-2014 inflasi Jawa Timur berada dibawah Nasional yaitu 7,59 persen (2013) dan 7,77 persen (2014).

4. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya Jawa Timur secara umum relatif baik, terutama yang menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan, kesalehan sosial, serta kesetaraan gender.

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2011-2014, telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan Jawa Timur dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan suatu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan. Angka Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari 7,22 persen Tahun 2011 menjadi 8,57 persen pada Tahun 2014, selanjutnya Angka Melek Huruf pada Tahun 2011 sebesar 99,29 persen meningkat menjadi 99,69 persen Tahun 2014. Demikian pula untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan peningkatan disemua jenjang pendidikan.

b. Kesehatan

Untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia faktor kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat

besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Jumlah tenaga medis yang berada di unit pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) pada Tahun 2014 secara umum mengalami peningkatan sebesar 2,3 % dibanding Tahun 2013 jumlah tenaga paramedis di unit pelayanan kesehatan meningkat sebesar 3,2%. (Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014).

Jumlah fasilitas kesehatan di Jawa Timur pada Tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding Tahun 2010 hal dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 :Perkembangan Sarana Kesehatan di Jawa Timur

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rumah Sakit Umum	Unit	170	179	187	197	197
2.	RSU Pemerintah;	Unit	48	50	54	55	55
3.	RSU Swasta	Unit	122	129	133	142	149
4.	Rumah Sakit Khusus	Unit	86	93	103	107	108
5.	RSK Pemerintah	Unit	7	8	10	10	11
6.	RSK Swasta	Unit	79	85	93	97	97
7.	Rumah Sakit TNI/POLRI	Unit	25	25	28	27	27
8.	Rumah Sakit BUMN	Unit	12	12	12	13	15
9.	Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)	Unit	948	950	956	960	960
10.	Puskesmas Pembantu	Unit	2268	2273	2281	2267	2274
11.	Puskesmas Keliling	Unit	1215	1063	1154	1135	1131
12.	Pos Pelayanan Terpadu (PASYANDU)	Unit	45310	45603	45600	45927	46016
13.	Pondok Bersalin (POLINDES)	Unit	5775	4580	3339	2914	2914
14.	Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES)	Unit	-	1608	2334	2888	2888
15.	Desa Siaga	Unit	8429	8501	8496	8489	8472

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui

Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Dari hasil perhitungan yang dilakukan BPS RI dengan metode tidak langsung, rata-rata AHH di Jawa Timur selama 4 (Empat) tahun terakhir 2010-2013 menunjukkan trend meningkat dari 69,27 pada tahun 2010 menjadi 70,46 ditahun 2014. (Sumber : BPS RI Tahun 2014).

c. Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat merupakan landasan terciptanya harmoni sosial, baik intra maupun antar umat beragama, antar golongan, maupun antar etnis dan ras. Penduduk Jawa Timur mayoritas beragama Islam (95,67%). Sedangkan penduduk yang beragama Kristen Protestan sebesar (1,98%), Katolik (0,98%), Hindu (0,94%), Budha (0,29%) dan lainnya (0,05%). Sampai tahun 2013 jumlah tempat ibadah di Jawa Timur sebanyak 204.432 buah terdiri dari Masjid (19,29%), Musholla (79,14%), Gereja (1,30%), Pure (0,18%), Vihara (0,07%) dan Klenteng (0,02%). (Sumber : Depag Kab/Kota Se Jatim Tahun 2013).

Kesenjangan multi dimensional memiliki potensi untuk semakin memecah-belah masyarakat kedalam kelompok-

kelompok secara tidak sehat. Hal ini dapat merenggangkan hubungan antar kelompok, dan menimbulkan rasa ketidakadilan, yang pada gilirannya dapat menjadi awal dari terjadinya konflik horizontal berdimensi suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Dengan tumbuhnya sarana dan prasarana pendidikan agama melalui lembaga/forum dan organisasi dinilai masih mampu mengurangi dampak negatif radikalisme yang dapat memicu terjadinya perselisihan antar-kelompok, baik intra-umat beragama maupun antar-umat beragama. Kondisi ini menggambarkan telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan para pemuka agama Jawa Timur untuk membangun harmonisosial, dan hubungan internal dan antar-umat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai.

d. Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender. Secara umum Kualitas kehidupan dan peran perempuan di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun bisa dibilang mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam kegiatan untuk mencapai kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan politik. Partisipasi perempuan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya capaian kinerja.

Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2012 sebesar 65,64, pada tahun 2013 sebesar 66,56. Pada tahun 2014 ditargetkan 67,80 dan realisasinya 68,53 (Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2014).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2012 sebesar 68,45, pada tahun 2013 meningkat menjadi 69,29, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar

70,50 dan realisasinya sebesar 71,56. (Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2014).

5. Kondisi Pemerintahan

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan kembali organisasi dinas daerah Provinsi Jawa Timur.

Jumlah dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 20 (Dua Puluh), terdiri Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Pertanian; Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Kehutanan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; dan Dinas Pendapatan. (Sumber :Perda Jatim No. 9 tahun 2008)

Sedangkan Sekretariat Daerah terdiri Asisten Pemerintahan membawahi 11 (sebelas) Biro, terdiri Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Biro Administrasi Kerjasama, dan Biro Hukum; Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Biro Administrasi Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Sumber Daya Alam; Asisten

Kesejahteraan Masyarakat membawahi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Kemasyarakatan; dan Asisten Administrasi Umum membawahi Biro Organisasi, Biro Humas Protokol dan Biro Umum. (Sumber : Perda Jatim No. 8 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Perda No.7 tahun 2010).

Sementara itu, badan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal, Badan Ketahanan Pangan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Perwakilan, RSUD Dr Soetomo Surabaya, RS Jiwa Menur Surabaya, RSUD Haji Surabaya, RSUD Dr Saiful Anwar Malang, RSUD Dr. Soedono Madiun, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jatim Wilayah I-IV, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Provinsi Korpri, serta Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. (Sumber : Perda Jatim No. 10 tahun 2008 diubah dengan Perda 8 tahun 2010).

Jumlah pegawai negeri sipil di Jawa Timur sampai 2014 mencapai 20.809 orang, terdiri 12.850 laki-laki (61,75%), dan 7.959 perempuan (38,25%). Jika dilihat dari golongan /kepankatan, jumlah terbanyak ditempati oleh pegawai negeri sipil golongan III sebanyak 10.901 orang (52,38%); disusul golongan II, 6.899 orang (33,10%); golongan IV, 2.437 orang (11,71%); dan golongan I, 572 orang (2,74%). (Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013).

6. Kondisi Sosial Politik.

Pemilihan Umum 2014 menghasilkan komposisi perolehan kursi partai politik di DPRD Provinsi Jawa Timur 2015-2019 sebagai berikut: Partai Kebangkitan Bangsa (20 kursi); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (19 kursi); Fraksi Gerindra (13 kursi); Fraksi Demokrat (13 kursi); Partai Golkar (11 kursi); Partai Amanat Nasional (7 kursi); Partai Keadilan Sejahtera (6 kursi); Partai Persatuan Pembangunan (5 kursi); dan Fraksi Nasdem Hanura (6 kursi). (Sumber : KPU Jatim Tahun 2014).

Kehidupan sosial politik masyarakat Provinsi Jawa Timur sangat dinamis, namun relatif terkendali dan aman. Hal ini terbukti dari pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2014 yang berlangsung sampai dua kali putaran, kemudian melahirkan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Meski suhu politik Jawa Timur selama berlangsungnya Pemilihan Gubernur sempat memanas, namun tidak sampai menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Jumlah organisasi masyarakat yang tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa sampai 2013 sebanyak 873 buah.

7. Kondisi Prasarana Wilayah

Pada 2014, panjang jalan raya di Jawa Timur mencapai 37.878,60 kilometer, terbagai atas jalan nasional (1.934,23 km), dan jalan Provinsi (1.760,91 km) serta jalan Kabupaten/ Kota (34.183,46). Dari total panjang jalan tersebut 80,20% dalam kondisi baik, kemudian 65,18% lainnya dalam kondisi sedang, dan sisanya sebesar 18,76% dalam kondisi rusak ringan dan berat. (Sumber : Dinas PU Binamarga Prov Jatim Tahun 2014).

Selain itu sebagai salah satu program strategi nasional yaitu pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang melintasi delapan Kabupaten sepanjang pantai Selatan, dengan sharing pembiayaan antara APBN, APBD Provinsi dan delapan APBD Kabupaten.

Sistem perkeretaapian di Jawa Timur telah dibangun sejak era kolonialisme Hindia-Belanda. Jalur kereta api di Jawa Timur terdiri atas jalur utara (Surabaya Pasar Turi-Semarang-Jakarta), jalur tengah (Surabaya Gubeng-Yogyakarta-Jakarta), jalur lingkaran selatan (Surabaya Gubeng-Malang-Blitar-Kertosono-Surabaya), dan jalur timur (Surabaya Gubeng-Jember-Banyuwangi). Jawa Timur juga memiliki sistem transportasi kereta komuter dengan rute Surabaya-Sidoarjo-Porong, Surabaya-Lamongan-Babat, Surabaya-Mojokerto, dan Malang-Kepanjen.. (Sumber : Dinas Perhubungan Prov Jatim Tahun 2014).

Pelabuhan Internasional Tanjung Perak adalah pelabuhan utama yang berada di Surabaya. Pelabuhan berskala nasional, regional, dan lokal lainnya meliputi Pelabuhan Gresik di Kabupaten Gresik, Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo, Pelabuhan Pasuruan di Kota Pasuruan, Pelabuhan Sapudi di Kabupaten Sumenep, Pelabuhan Kalbut di Kabupaten Situbondo, Pelabuhan Sapeken di Kabupaten Sumenep, Pelabuhan Brondong di Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Paiton di Kabupaten Probolinggo, Pelabuhan Bawean di Kabupaten Gresik, serta Pelabuhan Kangean di Kabupaten Sumenep.(Sumber : Dinas Perhubungan Prov Jatim Tahun 2014).

Jawa Timur memiliki sejumlah pelabuhan penyeberangan, yakni Ujung-Kamal (menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura) dan Pelabuhan Ketapang (menghubungkan Banyuwangi dan Gilimanuk, Bali), Pelabuhan Kalianget (menghubungkan Madura dan wilayah kepulauan), serta Pelabuhan Jangkar di Situbondo..(Sumber : Dinas Perhubungan Prov Jatim Tahun 2014).

Bandara Internasional Juanda di Waru, Sidoarjo menghubungkan Jawa Timur dengan kota-kota besar di Indonesia dan luar negeri. Bandara lainnya adalah Bandara Abdul Rachman Saleh di Kabupaten Malang, Bandara Noto

Hadinegoro di Kabupaten Jember, Bandara Iswahyudi di Madiun, Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep, serta Bandara di Kabupaten Banyuwangi, Bandara perintis di Kabupaten Pacitan dan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik . (Sumber : Dinas Perhubungan Prov Jatim Tahun 2014).

8. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pemeliharaan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup, pengendalian sumber daya alam harus terus dijaga agar tetap dapat mendukung proses pembangunan yang tengah dijalankan. Untuk itu, pemeliharaan kualitas air sungai, kualitas udara ambien, pengendalian sampah, dan pencegahan meluasnya lahan kritis mendapatkan perhatian serius.

1). Kualitas Air Sungai.

Untuk menjamin kelayakan air yang dikonsumsi digunakan ukuran baku dalam menentukan kualitas air yakni melalui kadar kandungan biochemical oxygen demand (BOD). Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 413 Tahun 1987 menetapkan standar baku mutu limbah cair untuk COD berada pada kisaran 3-5 mg/liter.

Sungai di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 6 (enam) wilayah meliputi wilayah Sungai Madiun, Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas Tengah, Brantas Hilir, Sungai Pekalan Sampean dan Wilayah Sungai Madura. Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas paling banyak dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari.

Kadar BOD rata-rata Sungai Brantas selama tahun 2013-2014 fluktuatif dan berada di atas ambang batas yang dipernankan yaitu sebesar 5,14 mg/liter sedangkan pada tahun 2014 turun menjadi 4,33 mg/liter. Kadar BOD Sungai Bengawan Solo dari tahun ketahun juga meningkat. Pada tahun 2013 kadar BOD Sungai Bengawan Solo adalah 4,40 mg/liter,

kemudian meningkat menjadi 4,91 mg/liter pada tahun 2014. (Sumber : BLH Prov Jatim tahun 2014).

Namun secara umum dari tahun ketahun, kadar BOD Sungai Bangawan Solo lebih rendah daripada Sungai Brantas. Beban limbah cair Sungai Brantas lebih tinggi daripada Sungai Bengawan Solo. Kualitas Air Bengawan Solo relative lebih baik dibanding Sungai Brantas.

Potensi sumber daya air Sungai Brantas diupayakan untuk terus dilestarikan, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikendalikan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sungai Brantas yang berawal dari mata airnya di Sumber Brantas di lereng Gunung Anjasmoro, mengalir ke hilir melewati 11 Kabupaten dan 4 Kota, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 12.000 Kilometer persegi menuju muaranya di Selat Madura, dengan total panjang alur Sungai mencapai 320 Kilometer. (Sumber : Dinas PU Pengairan Prov Jatim tahun 2014).

Untuk melestarikan potensi sumber daya air di DAS Brantas diupayakan membangun beberapa bendungan di daerah hulu, serta menjaga keutuhan kondisi kawasan sabuk hijau (green belt area) di sekeliling waduk serta kawasan tangkapan air di hulunya (catchment area). Ada 7 bendungan besar serbaguna yang telah dibangun. (Sumber : Dinas PU Pengairan Prov Jatim tahun 2014).

Di samping untuk melestarikan potensi sumber daya air di DAS Brantas, pembangunan bendungan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi tersebut agar bias dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama kelangsungan ketersediaan air bagi berbagai keperluan rumah tangga, perkotaan, industry, perikanan, irigasi dan lainnya, serta pengembangan energy melalui pembanguna pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan wariwisata.

Untuk mengendalikan daya rusak air di DAS Brantas, guna melindungi aset maupunkawasan strategis dari bencana banjir, telah diselesaikan beberapa bangunan pengedali banjir, seperti Bendungan, tanggul-tanggul normalisasi alur dan sebagainya. (Sumber : Dinas PU Pengairan Prov Jatim tahun 2014).

2). Kualitas Udara Ambien.

Standar baku mutu udara dapat diketahui dari kandungan Nitrogen Oksida (Nox), Karbon Monoksida (CO), Sulfur Oksida (Sox), dan partikel debu. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1996 menetapkan standar baku mutu untuk Nox (0,05 ppm), CO (20 ppm), Sox (0,05 ppm) dan debu (0,26 mg/M³).

Semakin meningkatnya perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor sangat mempengaruhi kualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan pada tahun 2012, setiap unsur ambien udara memenuhi standar baku mutu udara, kecuali Nox. Sedangkan pada tahun 2013 unsur yang tidak memenuhi standar baku mutu adalah partikel debu.

Secara umum ambien udara wilayah perkotaan Jawa Timur menunjukkan kualitas yang cukup baik, yang terlihat dari angka Kab yang semakin meningkat dari 21,35 pada tahun 2013 menjadi 24,54 pada tahun 2014. (Sumber : BPL Prov Jatim tahun 2013).

3). Lahan Kritis.

Keberadaan Taman Hutan Raya (TAHURA) ditujukan untuk menjaga pelestarian alam, mengembangkan pendidikan dan wisata, juga berperan dalam pemeliharaan kelangsungan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, DAS Konto dan DAS Kromong, juga untuk melestarikan mata air sumber Sungai Brantas di Desa Tulungrejo, Kecamatan

Bumiaji, Kota Batu, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1992, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 11190/KPTS-II/2002, di Jawa Timur dibentuk kawasan pelestarian alam yang disebut Taman Hutan raya (TAHURA) R. Suryo yang mencakup areal seluas 27.868,30 Ha.

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Suryo mengelola kawasan TAHURA R. Suryo seluas 27.868,20 Ha, dengan rincian TAHURA Seksi wilayah Malang (8.928,30 Ha), TAHURA seksi Wilayah Pasuruan (4.607,30 Ha), TAHURA seksi Wilayah Mojokerto (11.468,10 Ha) dan TAHURA seksi Wilayah Jombang (2.864,70 Ha). Hasil pemantauan Foto Udara Mei 2009, terhadap TAHURA R. Suryo seluas 27.868,30 Ha, terdapat kawasan berhutan sekitar 21.287 Ha dan sisanya 6.500 Ha tidak berhutan lagi (gundul). Dari areal gundul yang dikategorikan lahan kritis itu, 1.500 Ha diantaranya lahan kritis abadi, yaitu sekitar puncak Gunung Welirang dan Gunung Arjuno. Dengan demikian, tersisa lahan kritis 5.000 Ha. Penanganan lahan kritis berlangsung setiap tahun melalui kegiatan reboisasi, yang rata-rata pertahun sekitar 1.000 Ha. Sampai tahun 2013, sisa lahan yang tergolong kritis berkurang menjadi 828 Ha. (Sumber : Dinas Kehutanan Prv Jatim tahun 2013).

Kondisi fisik 3 (tiga) Wilayah TAHURA (Malang, Pasuruan dan Mjokerto) cenderung kering dn berisi jenis tanaman alang-alang, serta semak belukar membuat kawasan hutan itu rawan bencana kebakaran saat musim kemarau. Sedangkan TAHURA di Wilayah Jnbang, sebagian besar ditumuhi tanaman basah, seperti phon pisang dan bamboo, sehingga aman di musim kemarau.

Hampir setiap tahun, dimusim kemarau, kawasan hutan selalu mengalami kebakaran. Jenis tanaman yang terbakar adalah tanaman jati muda, rumput dan alang-alang. Penyebab bencana kebakaran hutan, hampir 90% karena ulah manusia, seperti api unggun yang tidak dimatikan, puntung rokok milik pendaki yang masih menyala, atau sengaja dibakar oleh masyarakat sekitar untuk membuka lahan. Sisanya karena faktor alam, seperti letusan gunung atau gesekan ranting-ranting yang kering. (Sumber : Dinas Kehutanan Prv Jatim tahun 2013).

Untuk lahan kritis non- TAHURA R. Suryo, terbagi menjadi 2 (dua) kategori yakni lahan kritis dalam kawasan, yaitu dalam kawasan hutan lindung (tidak termasuk areal HPH, ex HPH, areal bekas tebangan dan areal hutan mangrove). Dan lahan kritis luar kawasan yaitu diluar kawasan hutan (tidak termasuk lahan kritis areal hutan mangrove diluar kawasan hutan).

Luas kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 417/KPTS-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi mencapai 1.357.337,07 Ha. Data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa sampai dengan tahun 2009 luas lahan kritis dalam kawasan mencapai 38.239,06 Ha. Sedangkan lahan kritis diluar kawasan seluas 132.862,68 Ha.

Selama periode 2010-2013, lahan kritis dalam kawasan berhasil direhabilitasi seluas 38.139 Ha, sedangkan diluar kawasan hutan berhasil direhabilitasi seluas 122.860 Ha. (Sumber : Dinas Kehutanan Prv Jatim tahun 2013).

9. Kondisi Tata Ruang Wilayah.

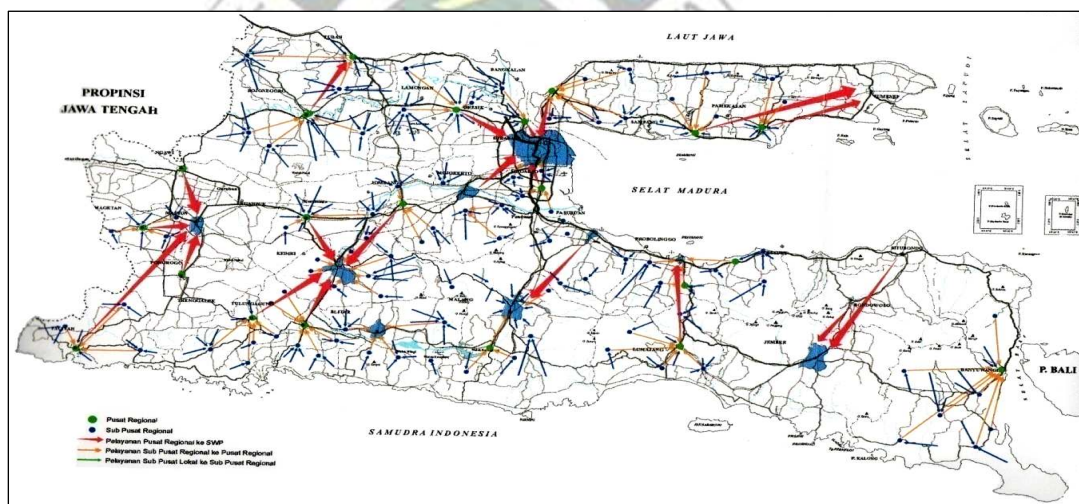
Secara umum perkembangan struktur ruang Jawa Timur mengarah pada dominasi kawasan perkotaan yang mempengaruhi perekonomian wilayah pedesaan. Fenomena

urbanisasi dan aglomerasi wilayah terus berkembang mengarah ke hierarki perkotaan lebih besar, sehingga *primacy* kota metropolitan semakin tinggi dibandingkan tingkatan kota-kota lainnya.

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang cenderung terus membesar, dan berpotensi mendorong perkembangan *mega-urban* tersebut, serta menyeimbangkan perkembangan perkotaan, dan mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan serasi dengan kawasan pedesaan sesuai daya dukung, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka struktur ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur dibagi menjadi sembilan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP).

Penentuan sembilan SWP di Jawa Timur berdasarkan kecenderungan pergerakan manusia, barang dan jasa, serta karakteristik wilayah. Orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa di Jawa Timur cenderung memusat pada titik-titik tertentu, dan mengarah pada wilayah yang telah terlebih dahulu berkembang. Kecenderungan pergerakan tersebut dapat dilihat pada peta berikut :

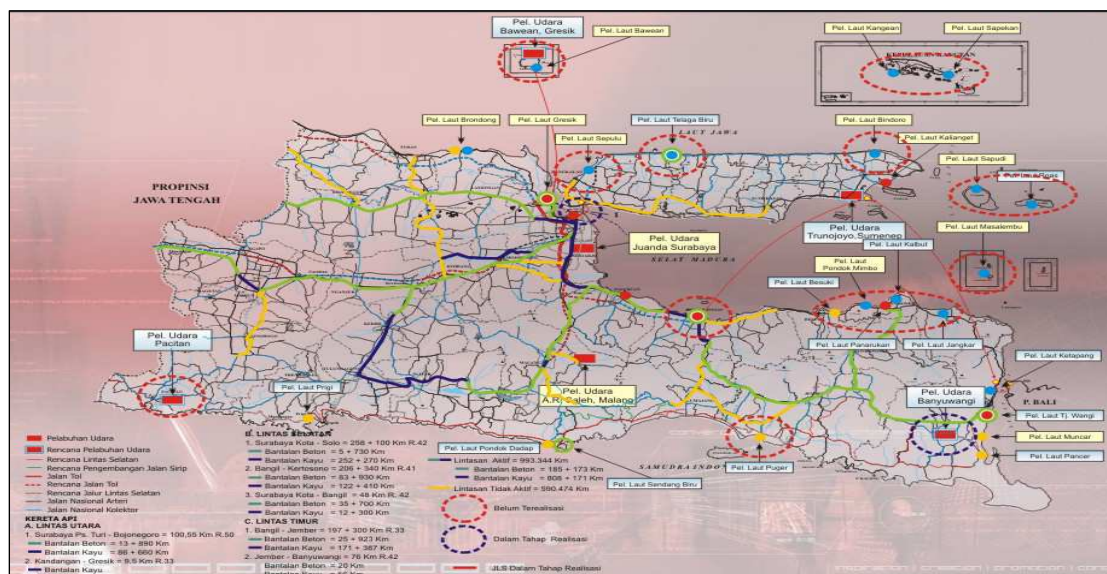
Gambar 1: Peta Orientasi Pergerakan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur



Sumber :RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa perlu ditunjang prasarana wilayah. Gambaran kondisi eksisting prasarana wilayah yang menopang struktur ruang dan kecenderungan pergerakan barang dan jasa itu di samping telah diuraikan dalam sub-bab kondisi prasarana wilayah, dapat pula digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 : Peta Infrastruktur Eksisting Provinsi Jawa Timur



Sumber :RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Kecenderungan aktivitas manusia di Provinsi Jawa Timur dapat pula dilihat dari penggunaan lahan yang mencerminkan seberapa besar pemanfaatan ruang digunakan menopang kegiatan tertentu, sekaligus mencerminkan seberapa besar potensi/pola ruang yang harus dilindungi dan/atau dapat dibudidayakan.

Pola ruang wilayah Jawa Timur sampai dengan tahun 2013 terbagi atas 2 (Dua) bagian besar, tutupan lahan lindung dfan lahan budidaya. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.374 Ha (12,10%) dari luas Wilayah Provinsi Jawa Timur. Termasuk didalamnya kawasan lindung mutlak dimana terdapat cagar alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih

176.696 Ha, taman hutan raya seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta taman wisata alam seluas kurang lebih 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011)

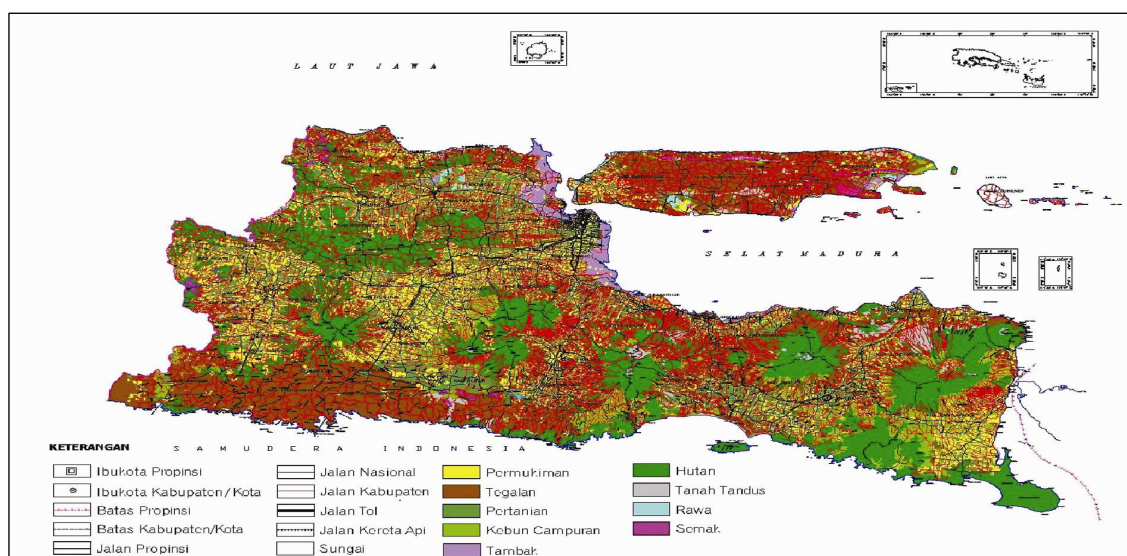
Adapun, penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha (87,90%) dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas Wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha (19,08%) dari luas Wilayah Provinsi Jawa Timur, Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis. Secara lebih diuraikan pada Tabel 2 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur dan Gambar 3 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.2 : Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur

A	Kawasan Lindung	548.548,20
A.1.	Kawasan Suaka Alam	28.967,00
A.1.1	Cagar Alam	10.958,00
A.1.2	Suaka Margasatwa	18.009,00
A.2.	Kawasan Pelestarian Alam	204.861,30
A.2.1	Taman Nasional	176.696,00
A.2.2	Taman Hutan Raya	27.868,30
A.2.3	Taman Wisata Alam	297,00
A.4.	Kawasan Perlindungan Bawah	314.719,90
A.4.1	Hutan Lindung	314.719,90
A.4.3	Kawasan Resapan air	0,00
B	Kawasan Budi Daya	4.201.403,70
B.1	Kawasan Hutan Produksi	782.772,00
B.2	Kawasan Hutan Rakyat	361.570,30
B.3	Kawasan Pertanian	2.020.490,71
B.3.1	Sawah Irigasi	911.863,00
B.3.2	Pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur	1.108.627,71
B.4	Kawasan Perkebunan	359.481,00
B.5	Kawasan Industri	7.403,80
B.6	Kawasan Permukiman	595.255,00
B.7	Lain-lain	74.430,89

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Gambar 3 : Pola Penggunaan Lahan Eksisting Prov Jatim



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Provinsi berdasarkan kewenangan yang dimiliki merupakan Daerah Otonom yang seluas-luasnya. Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang luas menjalankan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan.

Kewenangan wajib yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi meliputi : perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial,

pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup pelayanan pertanahan, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan perizinan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar dan lainnya, serta urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan Daerah dan potensi yang menjadi unggulan di Provinsi Jawa Timur.

Penyelenggara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. Dalam menyelenggarakan pemerintahan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas akuntabilitas, azas kompetensi, azas efisiensi dan azas efektifitas.

Tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Gubernur yang dikarenakan Jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Timur;
2. Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur Bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Pembinaan & pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;
- b. Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;

- c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Gubernur sebagai Kepala Daerah adalah

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing Daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan penge-lolaan keuangan Daerah;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah;
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

